

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan ekonomi masyarakat Cirebon yang terpusat di pelabuhan banyak menghasilkan pemasukan yang sangat besar untuk masyarakatnya. Cirebon memiliki pelabuhan sejak awal berdirinya Cirebon, pelabuhan tersebut sudah beroperasi sebagai jalur perdagangan atau sebagai tempat keluar masuknya barang perdagangan. Hal ini membuat Cirebon dijuluki dengan kota perdagangan atau kota pelabuhan.

Dengan sumber daya yang dimiliki Cirebon mampu menjadi daya tarik tersendiri, hal ini membuat pemerintah Eropa tertarik untuk menduduki wilayah Cirebon dan sektor ekonomi sebagai target utamanya. Sejak masa VOC (1602-1799) sampai masa pemerintahan Belanda, Cirebon merupakan pusatnya perekonomian di wilayah Jawa.

Sejak kedatangan VOC ke wilayah Cirebon, ia menjadikan Cirebon sebagai wilayah perdagangan. Dengan dijadikannya Cirebon sebagai wilayah perdagangan banyak perubahan pada kehidupan masyarakat khususnya di sektor ekonomi. Kedekatan VOC dengan pemimpin kerajaan/keraton mampu mengintervensi politik kerajaan/keraton untuk mendapatkan kekuasaan atas wilayah Cirebon.

Kerajaan Cirebon mulai tergeser perannya ketika VOC ikut serta dalam masalah pemerintahan. Hal ini menjadikan keraton yang merupakan otoritas tertinggi tidak bisa menjadi satu-satunya penguasa dalam mengatur persoalan kehidupan rakyat Cirebon. Namun intervensi VOC tidak bisa bertahan lama karena VOC mengalami kebangkrutan dan kekuasaan Cirebon dengan kedatangan Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan pemerintahannya, pada tanggal 18 Januari 1807 mengangkat Herman Willem Daendels (1808-1811) untuk menjadi Gubernur Jendral yang diangkat langsung oleh Lodewijk Napoleon.<sup>1</sup> Pada masa pemerintah Daendels tanah dan segala bentuk penguasaan di Jawa merupakan hak mutlak pemerintahan kolonial. Daendels memberlakukan sistem pemerintahannya dengan sistem pemerintahan sentralis, yakni menjalankan pemerintahannya mengontrol langsung sebagai kepala negara tanpa ada perantara, baik bupati ataupun sultan.

Dikeluarkanlah *Reglement op het baheer vande Cheribonsche Landen* pada tanggal 2 Februari 1809, yang berisikan para sultan Cirebon diangkat menjadi pegawai pemerintah Belanda. Ia diangkat menjadi Bupati yang secara tidak langsung sebagai bawahan Belanda dalam pengawasan *perfect*,<sup>2</sup> yang intinya kekuasaan kesultanan Cirebon hanyalah sebagai pegawai pemerintahan biasa yang hanya diberi upah gaji. Meskipun demikian para sultan masihlah mempunyai kekuasaan dengan menjadi pemimpin di daerah masing-masing.

Kegiatan perekonomian Cirebon pada masa pemerintahan Belanda berpusat pada kegiatan perokonomian yang berorientasi pada perkebunan modern, dimana lebih mementingkan ekspor. Perekonomian Cirebon masih bersifat tradisionial, di mana rakyat dipaksa untuk melakukan penanaman yang berorientasi ekspor seperti kopi dan tebu. Masyarakat Cirebon melakukan pertanian masih bersifat *subsisten*, dalam artian pertanian yang dilakukan oleh rakyat Cirebon hanya untuk memenuhi kehidupan pangan

---

<sup>1</sup> Louis Napoleon Bonaparte, pangeran Francis, Conte de Saint-Leu (lahir 2 September 1778-25 Juli 1846 wafat umur 67 tahun). Raja Hollandia 91806-1810). Dikenal sebagai Lodewijk Napoleon di Belanda., adalah anak kelima dan putra keempat yang bertahan hidup dari Carlo Buonaparte dan Letiza Ramolino. Saudara laki-lakinya adalah Kaisar Perancis, Napoleon I, dan putranya adalah yang terakhir, Napoleon III.

<sup>2</sup> Pejabat kolonial setingkat Residen. Jabatannya lebih tinggi dari Sultan dan Bupati. Yang kita diketahui Bupati merupakan pegawai pemerintahan.

sehari-hari. Sementara itu dituntut untuk melakukan pertanian modern, pertanian yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda yang bertujuan menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari pertanian tersebut.

Sebagian besar rakyat Cirebon pada umumnya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dari hasil pertanian. Di desa-desa mereka hidup bukan hanya berharap dari hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan pokok ataupun kebutuhan ekonominya. Akan tetapi di antara mereka juga dalam memenuhi kebutuhannya mengandalkan di luar sektor pertanian, seperti halnya di bidang pelayanan, jasa dan perdagangan.<sup>3</sup>

Perubahan-perubahan ini terjadi sebab pengaruh kekuasaan Belanda yang mulai memperkenalkan dan mewajibkan masyarakat Cirebon untuk menanam tanaman komoditi perdagangan internasional untuk kepentingan sendiri. Tanaman yang wajib ditanam oleh masyarakat Cirebon seperti tebu, tembakau, kopi, dan sebagainya. Jenis-jenis tanaman tersebut pada dasarnya para petani sudah mengenalnya sebelumnya.

Masuknya kolonial Belanda ke dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Cirebon, terlihat dari diwajibkannya para petani menanam kopi di daerah Cirebon dengan sistem tanam paksa sehingga berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat Cirebon. Dengan adanya jenis penanaman wajib, maka para petani tidak bebas memilih menanam tanaman yang akan ditanam, para petani dipaksa menanam tanaman dagang (*cash crop*) yang dapat diekspor ke luar negeri.

Dalam prosesnya, pelaksanaan wajib tanam ini memberikan dampak bertambahnya pola pertanian penduduk secara luas. Pola pertanian ialah dengan dibudidayakan tanaman dalam jumlah yang besar dan dengan area

---

<sup>3</sup> Jayanto. Skripsi: *Industri Gula di Keresidenan Cirebon Tahun 1860-1930 dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, (Yogyakarta: FIS UNY, 2015), hlm. 9

tanah yang mencukupi, setelah itu hasil yang didapatkan diekspor ke pasar Internasional.<sup>4</sup>

Pasukan tentara Inggris di bawah kepemimpinan Lord Minto<sup>5</sup> melakukan penyerangan ke Jawa. Tahun 1811 secara resmi pemerintah Inggris menggantikan kekuasaan pemerintah Belanda atas Jawa, terutama di Cirebon. Lord Minto melakukan ekspedisi ke tanah Jawa beserta rombongan termasuk di antaranya Thomas Stamford Raffles dan secara resmi mendaulat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jendral Pulau Jawa. Raffles sebagai pemimpin tertinggi di Jawa, ia berusaha menanamkan pengaruhnya dan menunjukkan perhatiannya yang lebih ketimbang Deandels. Raffles sangat memperhatikan lebih terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi sebagai keperdulian dan tanggung jawab pemerintahannya. Langkah awal yang diambil oleh Raffles ialah mengubah sebutan *perfectur/landdrostambt* menjadi *residency* (keresidenan).<sup>6</sup> Ia juga memperkenalkan jabatan baru dalam pemerintahan kolonial yaitu asisten residen. Residen Cirebon berkedudukan di kota Cirebon sebagai ibu kota keresidenan. Asisten residen secara langsung membawahi sultan dan bupati sebagai pegawai pemerintah kolonial.

Kedatangan Raffles di Cirebon, berusaha mengintervensi para Sultan dengan menghilangkan pengaruh Sultan secara penuh sebagai kepala daerah atau Bupati. Adanya intervensi terhadap keraton, mengakibatkan peran keraton menjadi tergeser. Akibatnya, keraton tidak lagi menampakan diri sebagai otoritas kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat Cirebon.

---

<sup>4</sup> Taufik dan Huddy Husein. *Perubahan Sosial Cirebon 1918-1925*, (Jakarta: Th. 6. No. 1. Mei 2014, 31-32), hlm. 31

<sup>5</sup> Zainal Masduqi. *Cirebon Dari Kota Tradisional Ke Kota Kolonial*, (Cirebon: Nurjati Press, 2011), hlm. 36

<sup>6</sup> A. Sobana Hardjasaputra, *Cirebon Dalam Lima Zaman: Abad Ke 15hingga Pertengahan Abad Ke-20*, (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm.136

Para Sultan tidak lagi menjadi satu-satunya pemimpin untuk memerintah rakyat Cirebon.

Berpindahnya kekuasaan Sultan ke tangan kolonial mengakibatkan posisi-posisi Sultan menjadi melemah. Kedudukan Sultan tidak lagi menjadi kekuatan penting karena tergantikan oleh kolonial. Pada tahun 1815, Raffles berhasil menghilangkan pengaruh Sultan secara penuh sebagai kepala daerah atau Bupati, ia berhasil memensiunkan para Sultan Cirebon dengan imbalannya mereka mendapatkan uang pensiun setiap tahun.<sup>7</sup>

Raffles juga berusaha menciptakan sistem kebijakan ekonomi yang terbebas dari unsur paksaan dan penindasan. Raffles sendiri menentang sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sistem di mana para petani dipaksa menanam tanaman dagang yang dapat diekspor ke luar negeri. Pemerintah kolonial Belanda hanya menciptakan pasar yang diperlukan untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Kebijakan Raffles adalah sistem yang bertolak pada ideologi liberal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi kebebasan.<sup>8</sup> Raffles memberi kebebasan kepada para petani, para petani bebas memilih menanam tanaman yang akan ditanam. Oleh karena itu Raffles ingin mengganti sistem kebijakan Belanda dengan kebijakan sistem yang baru. Raffles membuat kebijakan *landelijk stelsel* atau sewa tanah.<sup>9</sup> Yang bertujuan untuk memperbaiki sistem kekayaan alam dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Namun sistem yang baru ini tidak bisa diterapkan, karena masyarakat masih belum bisa menerima sistem yang baru ini dan masih berpegang pada sistem feodal (tradisional).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 140

<sup>8</sup> Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Emporium hingga Impirium*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hlm.219

<sup>9</sup> A. Sobana Hardjasaputra, dkk. *Op. Cit.*, hlm.180

<sup>10</sup> Sistem feodal (tradisional) adalah sistem kekuasaan yang dijalankan di kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja

Konsekuensi atas kebijakan ini merupakan kebijakan yang dapat dibidang revolusioner, jika dilihat dari hubungan antara kolonial dengan rakyat Cirebon ataupun dengan penguasa-penguasa lainnya. Hal ini mendorong hilangnya sistem yang memiliki unsur paksaan dan kesewenangan atas rakyat, dengan diterapkannya kebijakan tersebut merubah hubungan ekonomi antara pemerintah dengan rakyat atau pihak lainnya berdasarkan kontrak yang diadakan secara sukarela. Perubahan ini pada akhirnya menjadi perubahan ekonomi dan sosial budaya menggantikan ikatan-ikatan lama dengan ikatan yang belum pernah ada sebelumnya yakni ikatan kontrak.

Atas dasar hal tersebut Raffles memberikan pertimbangan upeti sewa tanah secara perorangan bukan lagi oleh desa sebagai keseluruhan. Raffles juga memberikan tanah persawahan bebas pajak bagi Sultan dan memberi subsidi gaji. Kebijakan ini mencegah para Sultan melakukan pungutan dari rakyat atau untuk biaya hidup Sultan. Tanah-tanah yang disewakan itu harus menghasilkan uang dan pembayaran sewa bisa dibayarkan dengan uang tunai. Namun, bukan hanya dengan uang tunai tetapi pembayaran dengan beras pun diterima.

Dalam proses pelaksanaannya sistem sewa tanah merugikan para petani Cirebon, tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan sebelumnya. Hal ini terjadi dalam kasus lahan pertanian yang sempit, uang sewa yang belum terbayarkan dan sistem sewa yang tiga tahun. Namun, jika lahan pertaniannya menguntungkan kedua pihak bagi pemerintahan maka perjanjian sewa akan ditambah satu tahun. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan sewa tanah justru menambah beban rakyat Cirebon karena harus membayar upeti sewa tanah kepada pemerintahan Raffles.

---

sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam kamus KBBI, feodal berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh bangsawan.

Kebijakan sewa tanah yang pada awalnya bertujuan mensejahterakan rakyat namun peraturan yang dikeluarkan banyak menambah beban rakyat. Perubahan ini membuat masyarakat Cirebon menjadi miskin karena harus menanggung bayar sewa, terlebih lagi terjadinya wabah penyakit dan kelaparan yang menyerang masyarakat Cirebon tahun 1812. Besarnya kontribusi hasil pertanian, ternyata membuat rakyat Cirebon tidak membuat kehidupan rakyat semakin baik keadaan sosial dan ekonominya.

Kebijakan sewa tanah itu diantara faktor yang mengakibatkan gerakan protes yang dilancarkan oleh rakyat Cirebon terhadap kebijakan yang dibuat oleh Raffles, selain itu tentu saja kebijakan lainnya seperti dipensiunkannya para Sultan Cirebon, sedikitnya uang pensiun yang diberikan oleh Raffles dan kegagalan panen. Pada intinya dengan adanya kebijakan sewa tanah, membuat beban para petani bertambah karena harus membayar uang sewa dan kebijakan memensiunkan sultan membuat para sultan hanya menjadi pemangku adat.<sup>11</sup>

Untuk menambah khazanah mengenai pemerintahan Raffles di Cirebon ditinjau dari segi sosial dan ekonomi masyarakat Cirebon pada waktu itu, penulis mencoba melakukan penelitian ini, karena kajian mengenai kebijakan Raffles di Cirebon belum banyak. Karena sampai saat ini kajian sosiologis mengenai kebijakan pemerintahan Raffles di Cirebon masih berada di luar kajian para peneliti. Oleh karenanya, penulis ingin mengisi kekosongan tersebut. Akhirnya penulis membuat judul penelitian ini **“Kebijakan Gubernur Jemdral Thomas Stamford Raffles dan Dampak Ekonomi Sosial Bagi Masyarakat Cirebon (1811-1818)”**.

---

<sup>11</sup>Nina H Lubis dkk. *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, (Bandung: Alqaprint, 2000), hlm. 46

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini secara umum berusaha untuk mengungkap bagaimana Cirebon di bawah kepemimpinan Raffles. Adapun dari latar belakang di atas, penulis menarik perumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Raffles di Cirebon?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan Raffles terhadap kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Cirebon tahun 1811 -1818?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana keadaan Cirebon di bawah kepemimpinan Raffles tersebut. Tujuan penelitian ini merupakan jawaban berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Raffles di Cirebon.
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan pemerintahan Raffles bagi kehidupan sosial ekonomi tahun 1811 Masehi sampai tahun 1818.

## **D. Kegunaan penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini terdapat banyak kegunaan baik kepada peneliti dan para pecinta literatur sejarah. Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini, adalah :

1. Memberi pemahaman dalam merekonstruksi peristiwa pada masa lampau dalam bentuk karya tulis.
2. memberi pengetahuan tentang Kebijakan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles di Cirebon pada tahun 1811-1818 M.
3. Memberi pengetahuan kesejarahan, sehingga dapat berfikir objektif tentang sejarah Cirebon masa Raffles dan dampak dari kebijakannya.

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumber pengetahuan dan bahan acuan bagi penulis penelitian sejarah selanjutnya.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar ruang lingkup penelitian terfokuskan, maka penulis ini akan membatasi lingkup penelitian :

Pembahasan ini terkait dengan awal Cirebon sebelum kedatangan kolonial Inggris ke tanah Jawa dan kondisi kehidupan sosial masyarakat Cirebon saat di bawah kekuasaan kolonial Belanda.

Pembahasan berikutnya terkait dengan biografi Raffles awal mula kedatangannya ke tanah Jawa dan awal mula kedatangan kolonial Inggris di Cirebon

Pembahasan berikutnya terkait dengan kebijakan Raffles yang diberlakukan untuk masyarakat Cirebon.

Hal yang akan dibahas berikutnya yakni terkait dengan dampak dari kebijakan Raffles bagi masyarakat Cirebon, dimana dalam hal ini berimbas pada kehidupan masyarakat Cirebon baik dari sisi kehidupan sosial maupun ekonomi.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, penulis menggunakan sumber-sumber buku sejarah maupun penelitian terdahulu yang menyangkut kawasan Cirebon maupun karya-karya mengenai sejarah pemerintahan Raffles di Cirebon, meskipun jumlahnya sedikit. Sehingga penulis menambahkan kajian pustaka dari sumber lain sebagai sumber tambahan atau sumber pendukung.

1. Aah Syafaah. *Kelas Sosial dalam Sistem Landeljik Stelsel Masa Raffles (1811-1816)*. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Tamaddun volume 6 tahun 2018. Artikel ini membahas tentang terjadinya kelas sosial di Cirebon karena kebijakan Raffles melalui sistem *landeljik* atau biasa disebut sewa tanah. Dalam artikel ini juga dijelaskan tentang gerakan sosial budaya para petani setelah sebelumnya kerja paksa dan penyerahan wajib hasil panen kepada kolonial Belanda. Persamaan dengan tulisan penulis adalah sama-sama menulis tentang sistem *Landeljik stelsel* namun, artikel ini membahas kelas sosial sedangkan penulis membahas tentang dampak dari kebijakan *Landeljik stelsel* itu sendiri.
2. Rosalina Ginting dan Agus Sutono. *Sistem Sewa Tanah Dalam Upaya Penghapusan Feodalisme di Jawa Abad XIX*. Aritikel yang dimuat dalam Ilmiah Civis volume 1 tahun 2011. Artikel ini membahas pengalaman yang didapat dari kebijakan sistem sewa tanah yang berlaku di bawah kekuasaan Raffles (kolonial Inggris) maupun di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Di dalam artikel ini dijelaskan juga mengenai ikatan-ikatan tradisional yang lama ada tidak mampu secara penuh menghapuskan penuh pengaruh-pengaruh sistem sewa tanah tersebut. Artikel ini sama-sama membahas tentang pengaruh kebijakan sistem sewa tanah dan penghapusan feodalisme namun, artikel ini hanya membahas secara umum pulau Jawa sedangkan penulis lebih khusus di Cirebon.
3. Hazmirullah, dkk. *Surat Pengunduran Diri Sultan Sepuh VII Cirebon: Suatu Kajian Filologis*. Artikel yang dimuat oleh jurnal *Jumantara* volume 8 tahun 2017. Artikel ini membahas tentang naskah surat Sultan Sepuh VII yang ditujukan kepada Thomas Stamford Raffles. Melalui

surat itu Sultan Sepuh VII Cirebon menyatakan kerelaannya untuk dipensiunkan dari jabatan publik. Artikel ini sama-sama membahas surat pensiunnya para Sultan Cirebon namun perbedaannya penulis lebih khusus membahas peran sultan Cirebon setelah dipensiunkan dari pejabat umum.

4. Kiki Rizky Palmaya. *Kebijakan Landrent Pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816*. Skripsi yang ditulis oleh Kiki Rizki Palmaya pada Program Studi TAHUN 2017 Pendidikan Sejarah Universitas Lampung tersebut menjelaskan tentang kebijakan *landrent* atau biasa disebut pajak tanah yang dengan tata kelolanya berhasil mengeksploitasi tanah Jawa. Dalam skripsi ini juga menerangkan kegagalan kebijakan *landrent* yang diterapkan oleh Raffles di tanah Jawa karena tanah Jawa masih bersifat feodalisme yang menyulitkan pemerintah Inggris dalam menjalankan sistem *landrent* tersebut. Skripsi ini sama-sama membahas tentang kebijakan Landrent yang dibuat oleh Raffles namun, skripsi kebijakan *landrent* secara umum di tanah Jawa. Sedangkan penulis lakukan lebih berfokus pada kebijakan *landrent* secara khusus di Cirebon.

## G. Landasan Teori

Landasan teori ialah landasan kerangka alur berfikir yang berfungsi untuk memudahkan penulis dan pembaca. Hal ini digunakan sebagai alat analisis.<sup>12</sup> Untuk membangun teori kita perlu memahami arti dari teori. Teori adalah gabungan definisi, konsep, proposisi yang saling terkait sehingga menghasilkan tinjauan secara sistematis atas fenomena dan variabel-variabel

---

<sup>12</sup> Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 2-3

yang terkait secara spesifik, dalam hal ini fenomena sejarah.<sup>13</sup> Jika berbicara mengenai Raffles tentang konsep sosial ekonomi terkait topik penulis, maka ada beberapa teori yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, yaitu:

1. Teori Kebijakan.

Menurut Syaiful Syagala, kebijakan dapat diartikan sebagai kepandaian, kebijaksanaan, kemahiran, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan rencana dasar untuk melakukan pekerjaan, kepemimpinan, pemerintahan, organisasi dan sebagainya garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.<sup>14</sup>

Kebijakan di atas dapat disimpulkan terkait dengan penelitian ini, ialah suatu pilihan pemerintah dalam membuat aturan untuk diterapkan di suatu wilayah ataupun lembaga untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan untuk mencapai sasaran. Dalam konteks penelitian ini, definisi kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan maupun keputusan yang dibuat oleh Raffles selaku pemimpin tertinggi di pulau Jawa untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat Cirebon.

2. Teori *Challenge and Respon*.

Setiap masyarakat dalam hidup berkehidupan sosial selalu banyak terdapat tantangan yang menimbulkan respon dari orang lain baik respon baik maupun buruk itulah menurut Arnold J Toynbee, yang sekarang dikenal dengan teori *Challenge* (tantangan) and *Respons* (respon).<sup>15</sup> Teori ini muncul karena sebuah peradaban yang

---

<sup>13</sup> Saefur Rachmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 102.

<sup>14</sup> Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 97

<sup>15</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Sosioteknologi, Cet.kedua*, (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2016), hlm. 1

memiliki siklus kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan karena adanya tantangan dan respon antara manusia dan alam sekitarnya.

Teori ini jika dihubungkan dengan dampak sosial ekonomi masa Raffles, ia menentang adanya kebijakan sistem tanam paksa yang pernah dilakukan oleh pihak Belanda, dari ketidaksukaanya Raffles ingin memberikan kebebasan usaha dan kepastian hukum bagi para petani yang kerap kali dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan barang ekspor yang dilakukan oleh Belanda.

Perubahan yang dilakukan oleh Raffles juga mendapat respon baik dari petani, tentunya perubahan ini menguntungkan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Cirebon karena para petani bebas memilih tanaman yang akan ditanam.

## **H. Metode Penelitian**

Metodologi didefinisikan sebagai kajian atau ilmu tentang metode. Lebih luasnya metodologi penelitian yaitu cara menulis sejarah mengenai suatu tempat, periode, lembaga atau orang. Menurut Sartono Kartodirjo, metodologi lebih tinggi tingkatnya dibanding metode, karena metodologi bukannya hanya tentang cara memperoleh pengetahuan, namun mengetahui apa yang harus diketahui. Metodologi menyangkut cara-cara atau prosedur yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian yang pada umumnya dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, melakukan analisis data dan diakhiri dengan kesimpulan.

Sejarah merupakan studi yang menghimpun dari masa kini hingga masa lampau. Karena keterbatasan data-data yang diperoleh untuk direkonstruksikan maka memerlukan metode penelitian. Dalam hal ini penulis dalam menyusun tema skripsi ini, penulis menggunakan metode

penelitian historis/sejarah. Yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan baik melalui proses menguji ataupun menganalisis sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu sehingga menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.<sup>16</sup>

Adapun metode historis/sejarah terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai penelitian sebagai berikut:

Langkah pertama ialah heuristik. Heuristik adalah teknik pencarian data, yang berasal dari bahasa Yunani *heurischein* artinya memperoleh yang diarahkan pada penacarian, pengumpulan, dan pengumpulan sumber yang akan diteliti.<sup>17</sup> Heuristik merupakan suatu seni, suatu teknik, suatu ketrampilan dalam menemukan atau menangani, dan memeperinci bibliografi serta merawat catatan-catatan dan pengklasifikasian.<sup>18</sup>

Sebelum melakukan pengumpulan sumber yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji, kita perlu mengetahui bahwa sumber sejarah terdiri dari sumber tulisan, lisan, dan benda. Karya ilmiah kita akan lebih bagus jika terdapat sumber seluruhnya jika memungkinkan.<sup>19</sup> Tanpa ketiganya seorang peneliti tidak bisa mendapatkan penjelasan akan peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau.

Sumber yang dimaksud adalah sumber sejarah, dalam hal ini penulis melakukan langka heuristik dengan mencari data yang berkaitan dengan topik di antaranya yaitu, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang berasal dari bukti sejarah yang sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Sedangkan sumber sekunder ialah sumber yang

---

<sup>16</sup> Sulman. *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 74

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 104

<sup>18</sup> Dadung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 93

<sup>19</sup> Abd Rahman Hamid, Muhammad Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2008), hlm. 43

berasal dari saksi yang tidak hadir dalam peristiwa, bisa juga berasal dari buku-buku atau tulisan hasil penelitian yang membahas tersebut.<sup>20</sup>

Sumber primer yang peneliti cari seperti Arsip “*surat pemensiunan sultan*” yang berisi tentang pemensiunan sultan Cirebon dan mendapatkan gaji. Sumber primer tersebut terdapat di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), dan Arsip daerah Cirebon.

Selain itu, penulis melakukan pencarian data sumber skunder yang terdapat dari buku-buku, skripsi, dan jurnal yang terkait dengan penelitian penulis.

Langkah kedua ialah verifikasi. Verifikasi merupakan proses pengkajian atau penafsiran sumber upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber.<sup>21</sup> Bagi seroang sejarawan kita perlu berhati-hati dalam menerima sumber, tidak begitu saja mempercayakan kebenaran tanpa kritik dan rasa curiga akan sumber yang diperoleh.

Maka peneliti melakukan kritik sumber sejarah dengan menggunakan cara di atas yaitu kritik eksternal (otentitas) dan internal (kredibilitas). Kritik eksternal yakni usaha untuk menguji keaslian (otentitas) sumber yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian fisik.<sup>22</sup> Kritik eksternal ini, peneliti melakukan dengan cara menyeleksi sisi-sisi fisik dari sumber yang diperoleh. Seperti, sumber yang didapat berupa naskah, dokumen arsip maka harus diteliti kertasnya terlebih dahulu, kata-katanya, bahasanya, kalimatnya, tinta yang digunakan, gaya tulisannya, juga bentuk luar dari sumber tersebut.

---

<sup>20</sup> Sulman, *Op. Cit.*, hlm. 96

<sup>21</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35

<sup>22</sup> Dudung Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 108

Selanjutnya, peneliti melakukan kritik internal yakni kritik yang mengacu pada keabsahan tentang kevalidan sumber (kredibilitas).<sup>23</sup> Artinya apakah isi dokumen tersebut dapat dipercaya, tidak ada manipulasi, tidak mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain.<sup>24</sup> Penulis melakukan pengecekan terhadap isi dari sumber yang didapat, sesuai atau tidaknya dengan bukti dan fakta yang ada.

Sedangkan sumber yang didapat dari internet, penulis melakukan pengecekan terhadap situs webnya yang didapat merupakan situs resmi atau dapat dipercaya. Setelah dilakukan pengaksesan file dari internet, peneliti melakukan kritik internal terhadap data yang didapat dari situs web tersebut. Apakah bisa dipercaya atau tidak.

Langkah ketiga ialah interpretasi. Interpretasi adalah tahapan selanjutnya setelah melakukan verifikasi sumber, Interpretasi mengandung makna penafsiran.<sup>25</sup> Tahapan ini peneliti melakukan dengan kehati-hatian, bertujuan agar menguraikan fakta-fakta sejarah serta menjelaskan masalah yang akan dibahas agar terhindar dari fakta yang subjektif, dalam artian peneliti mengaitkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Dengan begitu sejarah dapat ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah.<sup>26</sup>

Maka pada tahapan ini peneliti berusaha menguraikan beberapa fakta yang telah terkumpul yang sebelumnya telah diseleksi pada tahap verifikasi sumber. Bukan hanya itu, peneliti juga mengkorelasikan fakta-fakta yang telah diperoleh dari hasil verifikasi sumber yang kemudian disusun secara kronologis sehingga menjadi sebuah penjelasan yang mudah dipahami.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 109.

<sup>24</sup> Suhartono W. Pranoto, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>25</sup> M. Dien Madjid, dkk, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 29.

<sup>26</sup> Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: ombak, 2012), hlm. 94

Langkah keempat ialah historiografi. Tahap terakhir yang harus dilakukan oleh seorang sejarawan yakni historiografi. Historiografi merupakan cara merangkaikan fakta-fakta berikut maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah.<sup>27</sup> Setelah melewati tahapan-tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi sebagai hasil karya dalam sebuah penelitian sejarah, sebagaimana dengan laporan karya ilmiah.

Pada tahap ini pula, penulis menuangkan dan mengeksplor segala ide-ide yang berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang sesuai dan masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh pembaca.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini agar lebih jelas dan sistematis, mengenai Kebijakan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles Dan Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Cirebon (1811-1818) ini disusun dalam lima bab penulis. Dalam penyusunannya akan membagi menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab.

**Bab pertama** membahas pendahuluan yang terdapat sub-sub bab sebagai berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua** adalah mengenai tentang biografi Gubernur Jendral Stamford Raffles meliputi Cirebon masa awal kedatangannya DI tanah Jawa, yang berhasil menghilangkan pengaruh kekuasaan kolonial Belanda di tanah Jawa.

---

<sup>27</sup> Sulasman, *Op.Cit*, hal. 148.

**Bab ketiga** adalah mengenai uraian kebijakan Raffles. Bab ini menguraikan tentang Kebijakan Raffles mengenai pemensiunan para Sultan, pembentukan komite MacKenzie dan kebijakan Reformasi agraria dan kebijakan sewa tanah.

**Bab keempat** adalah mengenai uraian dampak dari kebijakan sewa tanah yang diterapkan oleh kekuasaan Raffles bagi masyarakat Cirebon yang kemudian dampak tersebut berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Cirebon.

**Bab kelima** adalah penutup. Uraian mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi, dengan menarik inti pembahasan pada bab-bab sebelumnya dengan menjadikan jawaban atas rumusan masalah yang ada.

